

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai implementasi Rencana Kontinjensi (Renkon) Kota Padang Tahun 2017 dalam sistem komando penanganan darurat bencana di BPBD Kota Padang, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Implementasi Rencana Kontinjensi Kota Padang Tahun 2017 dalam sistem penanganan darurat bencana secara umum masih berjalan, namun bersifat parsial dan adaptif, dengan berfokus pada penerapan struktur sistem komandonya. Meskipun dokumen tersebut secara formal telah kedaluwarsa dan tidak lagi relevan dari segi data risiko dan sumber daya, kerangka kerja komando yang diatur di dalamnya tetap menjadi satu-satunya acuan operasional bagi BPBD Kota Padang hingga saat ini. Keberhasilan dan hambatan implementasi ini dapat dianalisis melalui empat variabel teori George C. Edward III:

1. **Komunikasi:** Alur komunikasi dan aktivasi sistem komando secara formal telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, diperkuat oleh posisi Kepala BPBD yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah, sehingga mempermudah koordinasi vertikal ke OPD lain. Namun, di tingkat teknis, implementasi dihadapkan pada kendala serius berupa pemahaman yang tidak merata terhadap isi Renkon, baik di internal BPBD maupun lintas sektor. Untuk mengatasi fragmentasi dan ego sektoral, BPBD berhasil membangun

praktik komunikasi informal, seperti kegiatan coffee morning, yang terbukti efektif mencairkan kekakuan birokrasi dan memperkuat koordinasi di lapangan.

2. **Sumber Daya:** Terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan sumber daya yang diproyeksikan dalam Renkon 2017 dengan ketersediaan aktual di lapangan, baik dari segi personel, logistik, maupun anggaran. Keterbatasan anggaran daerah (BTT) membuat BPBD sangat bergantung pada Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk operasional darurat. Dari sisi sumber daya manusia, kapasitas personel belum merata dan tidak semua memahami tugasnya dalam struktur komando, meskipun berbagai pelatihan dan gladi telah dilaksanakan.
3. **Disposisi Pelaksana:** Secara kelembagaan, terdapat komitmen yang kuat untuk mematuhi sistem komando yang diatur dalam Renkon. Para pelaksana di lapangan, termasuk relawan, menunjukkan inisiatif dan fleksibilitas yang tinggi, mampu berimprovisasi untuk mengatasi kendala prosedural dan keterbatasan sumber daya. Meskipun demikian, disposisi positif ini masih dibayangi oleh tantangan ego sektoral yang muncul akibat pemahaman peran yang tidak seragam dan belum terintegrasinya SOP antarlembaga.
4. **Struktur Birokrasi:** Struktur komando yang mengacu pada Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 telah diadopsi dan diaktifkan melalui instrumen formal seperti Surat Keputusan Wali Kota untuk pembentukan Posko. Namun, efektivitasnya terhambat oleh fragmentasi Standar Operasional Prosedur (SOP), di mana setiap instansi masih bergerak berdasarkan SOP internalnya masing-masing.

Hal ini menyebabkan tumpang tindih peran dan melemahkan prinsip satu komando di lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Renkon 2017 bertahan karena adanya adaptasi dan fleksibilitas para pelaksana yang ditopang oleh jejaring informal, bukan karena kepatuhan kaku terhadap dokumen yang secara substansial sudah tidak relevan. Penggunaan dokumen yang kedaluwarsa menjadi hambatan mendasar yang menghalangi perencanaan dan respons yang akurat terhadap dinamika risiko bencana saat ini. Oleh karena itu, pembaruan dokumen Renkon dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan yang terintegrasi serta penyatuan SOP lintas sektor menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak untuk memastikan efektivitas sistem penanganan darurat bencana di Kota Padang pada masa mendatang.

6.2 Saran

Dalam proses implementasi Rencana Kontinjensi (Renkon) Kota Padang Tahun 2017 dalam sistem komando penanganan darurat, tidak seluruh aspek kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Penelitian ini menemukan sejumlah hambatan dalam pelaksanaan, baik dari sisi komunikasi, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana, hingga struktur birokrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, penggunaan dokumen kebijakan yang sudah melampaui masa relevansinya turut menjadi kendala utama dalam merespons dinamika bencana secara adaptif.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memberikan beberapa saran kepada para pelaksana kebijakan untuk memperbaiki kinerja dan efektivitas sistem penanganan darurat ke depan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang melalui BPBD perlu segera memperbarui dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) dan menyesuaikannya dengan kondisi risiko serta kebutuhan saat ini.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas pendukung sistem komando darurat secara berkelanjutan.
3. Perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor serta penataan ulang struktur komando agar lebih responsif dan terintegrasi.

